

ABSTRAK

ANALISIS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN PESAWARAN DAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2013

Oleh

ANNISA RHAFIRNA

Pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal pertama dan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan sistem birokrasi. Salah satu upaya pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah melalui proses rekrutmen. Rekrutmen CPNS senantiasa mengalami masalah dari tahun ke tahun di setiap daerah, khusus dalam konteks penelitian ini yang terjadi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. Masalah yang muncul adalah terjadinya kecurangan pada tahapan formasi CPNS serta ketidaksiapan dan ketidakpahaman tim panitia seleksi dalam proses pelaksanaan rekrutmen tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu Tahun 2013. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu Tahun 2013 dilakukan melalui 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung belum bisa terlaksana karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki serta banyaknya wilayah yang diawasi menjadi penyebab pelaksanaan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung belum berjalan dengan maksimal. Pengawasan pasif dengan membuka posko pengaduan tentang rekrutmen CPNS. Mekanisme pengawasan pasif yang dilakukan Ombudsman adalah diawali dengan adanya laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman, jadi apabila

tidak adanya laporan, maka pengawasan Ombudsman bersifat pasif. Pengawasan pasif Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan pada Kabupaten Pesawaran. Pengawasan pasif yang dilakukan berupa membuka posko pengaduan rekrutmen CPNS dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam panitia pemantau seleksi CPNS.

Kata Kunci: Pengawasan, Rekrutmen dan Pemerintahan